

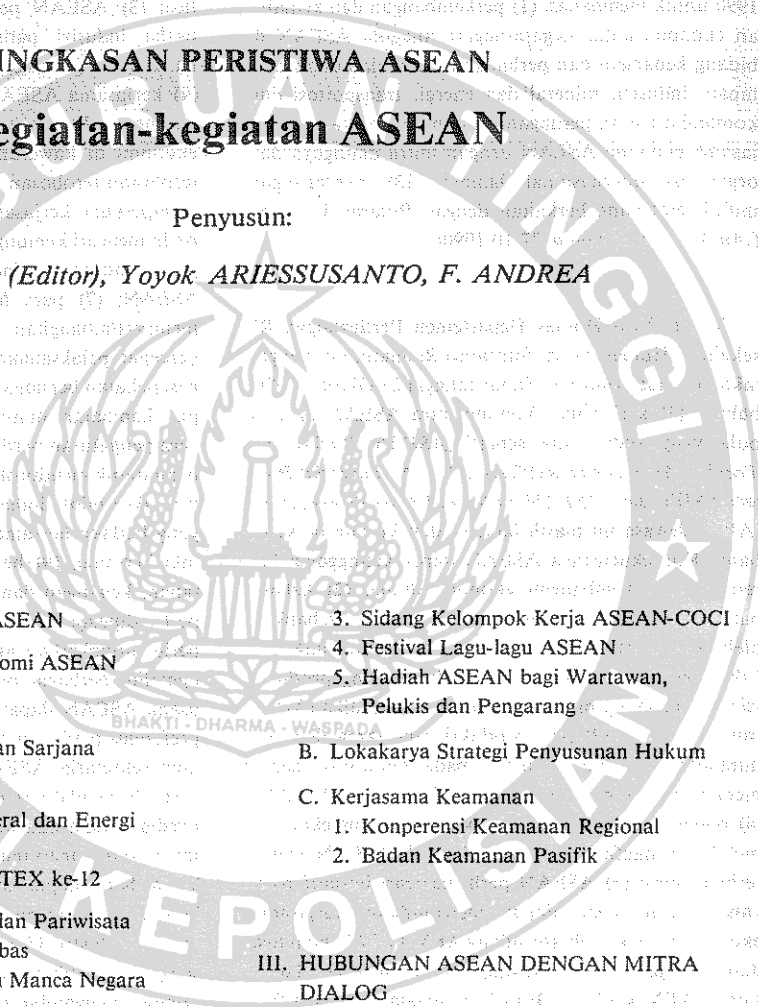
288

Dokumen

RINGKASAN PERISTIWA ASEAN Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:

SUDIBYO (Editor), Yoyok ARIESSUSANTO, F. ANDREA



I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

- A. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN
- B. KTT Business ASEAN
- C. Konperensi Federasi Ikatan Sarjana Ekonomi ASEAN
- D. Kerjasama Industri, Mineral dan Energi
 - 1. Sidang AFCM ke-14
 - 2. Pertemuan Dewan AFTEX ke-12
- E. Kerjasama Perdagangan dan Pariwisata
 - 1. Zona Perdagangan Bebas
 - 2. Kunjungan Wisatawan Manca Negara
 - 3. Taman Nasional
 - 4. Tahun Kunjungan Indonesia 1991

- 3. Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI
- 4. Festival Lagu-lagu ASEAN
- 5. Hadiah ASEAN bagi Wartawan, Pelukis dan Pengarang

B. Lokakarya Strategi Penyusunan Hukum

- C. Kerjasama Keamanan
 - 1. Konperensi Keamanan Regional
 - 2. Badan Keamanan Pasifik

II. KERJASAMA NON-EKONOMI ASEAN

- A. Kerjasama Kebudayaan dan Informasi
 - 1. Kunjungan Wartawan ASEAN ke Muangthai
 - 2. Lokakarya dan Seminar Wartawan ASEAN

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOG

- A. Hubungan ASEAN-MEE
 - Pertemuan ASEAN-MEE
- B. Usaha ASEAN Membantu Penyelesaian Konflik Kamboja
 - 1. Pertemuan Kelompok Kerja Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC)
 - 2. Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB

I. KERJASAMA EKONOMI ASEAN

A. PERTEMUAN MENTERI EKONOMI ASEAN

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-22 berlangsung di Jakarta tanggal 29 Oktober 1990 dan dilanjutkan di Denpasar tanggal 29-30 Oktober 1990 untuk membahas: (1) perkembangan dan kemajuan ekonomi antar negara-negara anggota ASEAN di bidang keuangan dan perbankan, pertanian dan kehutanan, industri, mineral dan energi, transportasi dan komunikasi serta perdagangan dan pariwisata; (2) kerjasama ekonomi ASEAN dengan mitra dialognya dan organisasi internasional lainnya; (3) perdagangan multilateral yang berkaitan dengan Putaran Uruguay (*Angkatan Bersenjata*, 27-10-1990).

Kepala Biro Humas Departemen Perdagangan RI sekaligus Humas AEM, Suprpto Ranuatmojo mengatakan kepada Antara di Sanur tanggal 23 Oktober 1990 bahwa: (1) kerjasama ekonomi intra ASEAN melalui pola yang sudah ada seperti *ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA), *ASEAN Industrial Project* (AIP) dan *ASEAN Industrial Complementation* (AIC), dewasa ini masih lamban dan kurang berkembang. Konsekuensinya ASEAN dapat ketinggalan kereta dari perkembangan ekonomi dunia; (2) kelambanan kerjasama ekonomi intra ASEAN disebabkan oleh pola perdagangan negara anggotanya yang terfokus pada negara-negara besar dan barang produksi yang tidak saling mengisi, bahkan menimbulkan kesan saling bersaing; (3) pola produksi yang sama jika menimbulkan persaingan maka pada gilirannya dapat menghambat kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN; (4) potensi untuk mengembangkan kerjasama ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya di ASEAN masih terbuka luas; (5) ASEAN perlu mencari inisiatif baru yang berani agar dapat mewujudkan kerjasama ekonomi yang kokoh; (6) sidang AEM ke-22 hendaknya dapat menjabarkan tekad yang telah dilontarkan dalam sidang AEM ke-21 di Brunei Darussalam tahun 1989, yakni mengembangkan gagasan-gagasan baru di bidang kerjasama ekonomi intra ASEAN, sehingga tujuan mewujudkan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi regional yang tangguh, kohesif dan maju segera dapat direalisasikan; (7) maju dan kokohnya kerjasama ASEAN akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masing-masing negara dan dapat memperkuat ketahanan regional kawasan ini (*Angkatan Bersenjata*, 27-10-1990).

Presiden Soeharto mengatakan pada pembukaan Sidang para Menteri Ekonomi ASEAN ke-22, di Istana Negara tanggal 29 Oktober 1990 bahwa: (1) ASEAN perlu meningkatkan berbagai usaha agar tercipta kerjasama ekonomi intra ASEAN yang lebih berarti dan efektif; (2) ASEAN perlu memikirkan cara-cara pendekatan baru, terutama di bidang perdagangan dan investasi; (3) ASEAN perlu memusatkan perhatian pada usaha industri patungan dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada; (4) kerjasama ASEAN di bidang investasi perlu terus disempurnakan agar dapat meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan ini; (5) ASEAN perlu mencari terobosan-terobosan baru dan meningkatkan usaha memperkuat kerjasama yang telah ada; (6) ASEAN perlu mencari kemungkinan kerjasama baru yang mampu mendorong dan mengembangkan kerjasama ASEAN; (7) para Menteri Ekonomi ASEAN perlu mempertimbangkan sungguh-sungguh gagasan mempercepat pelaksanaan preferensi perdagangan di atas kesepakatan bersama yang telah dicapai, serta menghapus hambatan non-tarif dan menyederhanakan tata cara pengaturan perdagangan preferensi; (8) kebijaksanaan untuk mendorong perdagangan dan investasi pada produk-produk industri tertentu melalui tarif efektif yang berlaku bersama-sama untuk ASEAN perlu dijabarkan bersama; (9) bentuk kerjasama pertanian, kehutanan, keuangan dan pengangkutan yang lebih efektif perlu dipelajari bersama; (10) kegiatan penerangan perlu ditingkatkan agar para pengusaha semakin mengetahui berbagai peluang yang ada, sehingga dunia usaha ASEAN dapat memperoleh manfaat nyata dari preferensi perdagangan; (11) penelitian untuk memperkuat Sekretariat ASEAN perlu dimulai; (12) Sekretariat ASEAN hendaknya dapat memberikan pelayanan penyediaan data dan informasi, sehingga tugas para pejabat untuk merumuskan berbagai gagasan dan prakarsa baru dapat diperlancar; (13) Indonesia telah berusaha mendorong peningkatan investasi diberbagai proyek industri. Usaha ini diharapkan memperluas kesempatan pembangunan usaha-usaha swasta; (14) Indonesia menyambut gembira peran serta para pengusaha ASEAN dalam proyek-proyek di Indonesia; (15) semakin bertambah baiknya iklim ekonomi, dunia usaha akan memberikan peran serta yang lebih besar dalam kerjasama intra ASEAN (*Kompas*, 30-10-1990); (16) hubungan antara para pengusaha swasta ASEAN perlu terus dikembangkan, agar menghasilkan berbagai bentuk kerjasama baru, sesuai dengan tuntutan zaman yang sedang berubah secara dinamis; (17) kerjasama ekonomi antara anggota ASEAN diharapkan dapat

lebih meningkatkan sumbangannya pada pembangunan ekonomi dan kerjasama antar bangsa-bangsa di dunia, terutama kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih jujur, adil dan serasi; (18) berbagai usaha untuk mendorong kerjasama ekonomi intra ASEAN, seperti peningkatan hubungan ekonomi melalui penyempurnaan Pengaturan Perdagangan Preferensi dan usaha patungan industri ASEAN telah diadakan; (19) kerjasama ASEAN dengan mitra dialognya telah membawa manfaat yang penting bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN; (20) ketangguhan ASEAN terletak pada semangat yang berintikan kesatuan dan solidaritas anggota-anggotanya; (21) tidak sedikit masalah internasional, khususnya politik dan ekonomi, yang berhasil diselesaikan dengan memuaskan melalui semangat ASEAN; (22) kawasan Asia-Pasifik dewasa ini berhasil mempercepat kegiatan ekonominya, sehingga kekuatan ekonomi bergeser ke arah kawasan itu; (23) pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pasifik berada di atas rata-rata dunia dan inflasi berada dalam tingkat yang relatif rendah, sedangkan investasi dan alih teknologi semakin meningkat; (24) kebijaksanaan perdagangan, industri dan keuangan yang didasarkan pada kekuatan pasar untuk efisiensi dalam alokasi sumber-sumber daya telah dijalankan oleh sebagian besar negara di kawasan ini; (25) arus investasi di kawasan Asia-Pasifik dalam tahun-tahun terakhir telah meningkat secara berarti; (26) saling ketergantungan dalam usaha-usaha secara sadar menuju ekonomi yang lebih terbuka pada sebagian besar wilayah Asia-Pasifik telah memperbesar peluang untuk meningkatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan itu; (27) ASEAN perlu menciptakan kerjasama yang lebih tepat dan lebih menarik di bidang perdagangan, investasi alih teknologi dan sumber daya manusia; (28) ASEAN berkepentingan untuk menemukan pelbagai cara yang dapat menghasilkan keterkaitan dan manfaat bersama yang nyata guna memecahkan pelbagai masalah yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik; (29) ASEAN telah diakui memegang peranan yang makin meningkat dalam pembangunan dan kerjasama internasional. Pengakuan ini seyogyanya dimanfaatkan oleh ASEAN untuk mendorong pelaksanaan perdagangan yang terbuka, jujur dan adil; (30) ASEAN perlu mendukung sepenuhnya dan berusaha dengan berbagai cara untuk kesuksesan Putaran Uruguay, sehingga pembangunan ekonomi dunia akan didorong oleh sistem perdagangan internasional yang bebas dari segala hambatan (*Angkatan Bersenjata*, 30 Oktober 1990).

Menteri Perdagangan RI, Arifin Siregar, mengatakan kepada pers di Istana Negara Jakarta sesuai pem-

bukaan sidang AEM itu bahwa: (1) perkembangan Batam-Singapura-Johor atau segitiga pertumbuhan merupakan bentuk kerjasama ASEAN, meskipun tidak semua negara anggota terlibat, tetapi dapat diterapkan dan tidak perlu semua negara anggota ASEAN menyetujuinya; (2) dalam kerjasama intra ASEAN masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, karenanya perlu dipelajari cara-cara untuk meningkatkan kerjasama itu; (3) Indonesia ingin mengkonsultasikan cara-cara baru untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN guna menghadapi negara-negara atau pihak ketiga seperti Bank Dunia dan sebagainya; (4) belum pasti banyak suara yang setuju untuk menyelenggarakan KTT ASEAN pada akhir 1991, sebab masih diperlukan persiapan yang matang, khususnya dalam bidang ekonomi; (5) KTT ASEAN merupakan salah satu dorongan bagi para menteri dan pejabat negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan dan memperbaiki kerjasama yang telah ada (*Angkatan Bersenjata*, 30-10-1990).

Menteri Kehutanan RI, Hasjrul Harahap, mengatakan kepada pers di Denpasar sesuai penutupan sidang AEM hari pertama tanggal 29 Oktober 1990, bahwa: (1) jika dikaji lebih mendalam, maka sesungguhnya negara-negara industri yang menjadi sumber polusi utama selama ini, tetapi opini publik telah diarahkan untuk kepentingan negara-negara pengimpor kayu saja dengan tanpa melihat sisi dan kepentingan negara-negara pengeksport; (2) jika MEE mau mendengar suara Parlemennya saja untuk memboikot impor kayu tropis, maka Indonesia bersama ASEAN akan mengkonternya; (3) ASEAN telah sepakat untuk menjawab aksi Parlemen Eropa yang menganjurkan kepada pemerintahnya agar tidak mengimpor kayu dari Serawak, oleh sebab itu wajar bila ASEAN dan Indonesia khususnya, melakukan reaksi untuk hal yang sama; (4) ASEAN mendukung sikap Indonesia itu, karena kepentingan yang dilihat bukan masalah antar negara lagi, tetapi adalah sistem perdagangan internasional; (5) Indonesia tidak akan terkena dampak dari tindakan itu yang berupa menurunnya investasi dari MEE, sebab Jepang, Uni Soviet dan RRC sudah siap untuk masuk.

Pada saat yang sama, Menteri Perdagangan Arifin Siregar mengatakan kepada pers bahwa: (1) kampanye anti kayu tropis sedang gencar dilancarkan di seluruh dunia, khususnya oleh negara-negara MEE; (2) ASEAN telah sepakat untuk mengkonter isu anti kayu tropis, untuk itu pada tahap awal akan diadakan negosiasi antar negara-negara ASEAN; (3) polusi yang dibuat oleh negara-negara industri itu sayangnya tidak mendapat

tempat dalam pemberitaan pers internasional, termasuk pers Indonesia sendiri; (4) dunia usaha banyak memberi masukan dan bahkan keluhan akibat birokrasi yang berlebihan yang telah menghambat kelancaran dunia usaha; (5) pemerintah negara anggota ASEAN akan mempelajari secara serius keluhan itu untuk dicarikan jalan keluar yang baik sehingga semua kepentingan, baik pemerintah maupun swasta tidak terganggu; (6) kendala birokrasi memang benar ada dan perlu dicarikan cara yang tepat untuk mengatasinya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Sotion Ardjaggi, yang merangkap Wakil Presiden ASEAN-CCI mengatakan bahwa: (1) dalam merintis usaha-usaha perdagangan antar dunia usaha atau swasta, hambatan-hambatan banyak bermuara pada aturan-aturan yang kaku dari pihak pemerintah; (2) banyak keputusan-keputusan antar dunia usaha yang telah disepakati namun dalam operasionalnya banyak ditemui batu sandungan akibat aturan pemerintah dan birokrasi (*Suara Karya*, 30-10-1990).

Keputusan yang dihasilkan antara lain: (1) ASEAN akan melipatgandakan usahanya untuk meningkatkan kerjasama intra ASEAN dengan menerapkan serangkaian kebijaksanaan baru di bidang perdagangan, kerjasama industri dan investasi; (2) ASEAN menilai Segitiga Pertumbuhan Batam-Johor-Singapura dapat dijadikan model yang bermanfaat untuk memperkuat kerjasama, sekaligus mendorong perekonomian di kawasan; (3) ASEAN sangat prihatin terhadap hasil yang dicapai Perundingan Perdagangan Multilateral (MTN) Putaran Uruguay dan sekaligus mendesak negara-negara lain berbuat maksimal seperti yang dilakukan ASEAN demi keberhasilan Putaran Uruguay; (4) para Menteri Ekonomi ASEAN puas atas usaha melawan kampanye anti kayu lapis yang dilakukan oleh para Menteri Kehutanan ASEAN ke negara-negara MEE pertengahan bulan Oktober 1990. Misi serupa akan dilaksanakan pula ke negara-negara maju lainnya, termasuk dilakukannya serangkaian ikhtiar bersama ASEAN di setiap perundingan di bidang kehutanan; (5) mereka akan mengkaji kembali kerjasama ekonomi intra ASEAN yang dihadapkan pada perubahan politik dan ekonomi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar kawasan ini, sebab berbagai perubahan dan perkembangan itu merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan bagi masa depan ASEAN; (6) dunia swasta agar meningkatkan peran sertanya dalam bidang yang dilakukan di berbagai kesempatan; (7) persatuan ASEAN dalam APEC sangat penting dan diharapkan agar APEC melapangkan jalan bagi terciptanya perda-

gangan global serta tidak menjadi blok perdagangan tersendiri; (8) ASEAN prihatin atas berlanjutnya subsidi hasil pertanian di negara maju, karena subsidi itu akan mengurangi ekspor negara berkembang, termasuk ASEAN; (9) mereka menyambut gembira meningkatnya penggunaan mata uang negara ASEAN dalam perdagangan intra ASEAN, dan diharapkan angin segar ini juga berlangsung di bidang kerjasama perpajakan, manajemen keuangan dan moneter, serta pengembangan pasar modal dan BUMN. Di samping itu mereka sepakat untuk: (1) meningkatkan arus perdagangan dengan diterapkannya konsep tarif preferensi efektif yang sama terhadap sejumlah produk industri terpilih. Terobosan baru ini akan melapangkan jalan bagi arus barang intra ASEAN, sebab sejumlah komoditi industri yang belum ditentukan jumlah jenisnya akan mendapatkan potongan tarif bea masuk, bahkan tidak mustahil bea masuknya akan dihapuskan; (2) memperbarui program kerjasama patungan di bidang industri (AIJV) sehingga lebih atraktif bagi investasi di luar ASEAN dengan cara memperpanjang kesempatan bagi investor dari luar ASEAN untuk ikut serta dalam AIJV sampai akhir tahun 1993; (3) menerapkan tarif preferensi efektif yang sama pada barang-barang yang dihasilkan AIJV; (4) menghapuskan persyaratan minimum 5% dari modal yang ditanamkan negara ASEAN dalam proyek AIJV, namun sekurang-kurangnya harus ada dua negara ASEAN yang ikut serta, dan setelah proyek beroperasi komersial selama 4 tahun modalnya minimal 40%; (5) memperpanjang perlakuan khusus berupa pemotongan tarif bagi barang-barang yang dihasilkan AIJV. Hasil keputusan ini akan dinikmati oleh negara peserta AIJV; (6) memperpanjang persetujuan pemotongan tarif sebagaimana diatur dalam PTA yang akan berakhir 1992 menjadi tahun 1999; (7) memperluas PTA yang mencakup berbagai komoditi lainnya yang diharapkan akan meliputi peninjauan kembali terhadap potongan tarif (MOP atau *Margin of Preference*) bagi berbagai komoditi menjadi 75%, sedangkan bagi komoditi baru yang kelak dimasukkan dalam daftar PTA akan menikmati MOP 50% dari tarif normal yang berlaku sekarang ini. Dengan PTA baru ini, dari 15.000 jenis komoditi ASEAN yang masuk dalam daftar PTA yang menikmati MOP bervariasi antara 25% dan 50% akan naik menjadi 75%, sehingga perdagangan intra ASEAN akan meningkat dan harganya lebih bersaing dibandingkan dengan barang serupa dari luar ASEAN; (8) mengurangi persentase asal bahan baku kandungan ASEAN dari 50% menjadi 35% terhadap 21 jenis produk kimia, dan Indonesia ditetapkan 42% bagi produk kimia sejenis.

Pada akhir sidang para Menteri menandatangani beberapa protokol antara lain: (1) persetujuan tambahan mengenai proyek pertambangan potasium ASEAN yang berupa proyek patungan berkapasitas 1 juta ton potasium chlorida yang berlokasi di Muangthai dengan biaya investasi US\$289 juta; (2) persetujuan dasar mengenai *ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV)* (*Kompas*, 31-10-1990).

Menteri Perdagangan RI, Arifin M. Siregar mengatakan kepada pers sesuai sidang, bahwa: (1) gagasan untuk membentuk "Pasar Bersama ASEAN" tidak pernah terpikirkan dalam sidang Menteri Ekonomi ASEAN di Bali; (2) ASEAN tidak berkeinginan untuk membentuk suatu blok perdagangan seperti MEE, walaupun kalangan MEE sendiri berulang kali menegaskan bahwa Pasar Tunggal itu tidak menjurus kepada "Benteng Eropa"; (3) para pejabat teras ASEAN hanya memfokuskan perhatian pada peningkatan kerjasama intra ASEAN untuk menghadapi pihak ketiga, baik dalam rangka Uruguay Round (Putaran Uruguay) maupun dengan MEE dan AS; (4) ASEAN belum mengetahui dengan seksama, apakah Pasar Tunggal itu akan menjurus kepada perlindungan pasar atau proteksionisme; (5) cara terbaik untuk mewujudkan daya saing adalah dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada mitra usaha dalam arti yang luas apabila Pasar Tunggal Eropa itu dibentuk (tahun 1992); (6) ASEAN harus berkonsentrasi untuk menggalang kekuatan ke dalam, karena hubungannya dengan negara-negara non-ASEAN sendiri telah berjalan sangat mulus; (7) kerjasama ekonomi antara ASEAN sejauh menyangkut hubungan dengan negara-negara di luar ASEAN sangat baik dan sukses, tetapi hubungan intra ASEAN sendiri yang justru perlu dicarikan pola dan cara-cara baru untuk meningkatkan kerjasamanya; (8) dalam sidang tertutup Indonesia mengusulkan perlunya diterapkan "common tariff" atau tarif bersama dalam rangka peningkatan kerjasama ASEAN dan telah disetujui, sehingga pada masa-masa mendatang hasilnya telah dapat dirasakan; (9) selama ini ASEAN mentolerir mitra non-ASEAN tentang prinsip *joint venture* yakni dalam pembagian saham (*equity share*) 60% maksimum untuk non-ASEAN dan 40% untuk negara-negara ASEAN pemilik proyek; (10) komitmen kepada AIJV untuk memberikan toleransi sampai 60% kepada pihak swasta non-ASEAN yang sebenarnya harus berakhir 31 Desember 1990 diperpanjang sampai 31 Desember 1993 guna memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada investor non-ASEAN, terutama pihak MEE untuk menjadi partner ASEAN melalui AIJV (*Suara Karya*, 31-10-1990).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto mengatakan kepada pers di Denpasar tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) salah satu keputusan para Menteri Ekonomi ASEAN yang sangat strategis adalah kesepakatan untuk menetapkan bea masuk yang sama untuk beberapa barang hasil industri di kawasan ASEAN; (2) keputusan ini selain untuk memperlancar arus barang secara bebas di kawasan ini, juga akan meningkatkan perdagangan dan investasi di kalangan negara-negara anggota ASEAN; (3) hasil kesepakatan ini menunjukkan kedewasaan ASEAN, karena selain merupakan hal yang telah lama diperjuangkan dan diperdebatkan juga sangat fundamental; (4) pengarahan Presiden Soeharto dalam sidang pembukaan di Jakarta telah digunakan sebagai acuan penting dalam pembahasan sidang AEM; (5) dua hal pokok yang didiskusikan secara mendalam adalah Putaran Uruguay dan tatacara serta usaha yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kalangan ASEAN agar perkembangan ekonominya meningkat; (6) ASEAN sepakat untuk terus bekerjasama agar cita-cita Putaran Uruguay dapat dijalankan dengan baik; (7) ASEAN berharap negara-negara lain dapat melaksanakan kerjasama serupa agar peningkatan ekonomi dunia dapat dicapai dengan baik; (8) Putaran Uruguay dianggap suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan ekonomi semua negara di dunia melalui aktivitas perdagangan; (9) ASEAN memandang pelaksanaan keputusan dari Putaran Uruguay sangat lambat dan menghadapi suatu krisis, karena itu semua negara agar bekerjasama untuk mensukseskan sidang yang dilaksanakan bulan Desember 1990 (*Suara Pembinaan*, 2-11-1990).

Wakil Sekretaris FKP DPR-RI bidang Polkam, Marzuki Darusman, mengatakan kepada *Suara Pembinaan* bahwa: (1) KTT ASEAN yang direncanakan terselenggara akhir tahun 1991 diharapkan dapat melahirkan wawasan yang lebih luas untuk menciptakan keamanan baru guna menunjang peningkatan perekonomian di Asia Tenggara; (2) terciptanya keamanan baru sangat penting bagi ASEAN, khususnya untuk menjamin kelancaran upaya peningkatan investasi, perdagangan dan ekonomi; (3) selama ini ekonomi ASEAN berkembang dalam suasana keamanan yang dijamin oleh kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini. Pertanyaan timbul jika AS tidak berkepentingan lagi berada di sini, apakah Jepang yang menggantikan kedudukan itu atau India dengan kekuatan barunya?; (4) kerjasama keamanan ASEAN hendaknya mencakup semua hal yang memberikan wawasan lebih luas daripada sekedar keamanan di bidang militer; (5) KTT diharapkan mampu mengambil langkah politik untuk mendorong proses

pembentukan identitas ASEAN, karena identitas ASEAN sangat penting untuk meningkatkan rasa solidaritas di kalangan negara anggotanya agar dapat maju bersama, khususnya di bidang ekonomi; (6) untuk membangun identitas ASEAN diperlukan penelitian sejarah mengenai negara-negara yang tergabung dalam wadah regional tersebut; (7) ASEAN harus mampu merumuskan konsep hak-hak azasi, karena selama ini ASEAN dinilai defensif sekali terhadap hal itu; (8) di bidang politik, ASEAN dapat melakukan kerjasama dan perbandingan sistem parlemen serta menyerasikan prinsip-prinsip hukum; (9) membuat prinsip-prinsip hukum merupakan tantangan ASEAN untuk mendekatkan pandangan atas masing-masing sistem nasional yang ada agar terjadi faktor perekat di bidang hukum (*Suara Pembaruan*, 3-11-1990).

Direktur Eksekutif Institut Manajemen Prasetya Mulya, Dr. Djisman S. Simandjuntak, mengatakan bahwa: (1) integrasi ekonomi ASEAN sebenarnya telah terjadi pada dua jalur di luar ASEAN, yakni melalui: (a) liberalisasi di masing-masing negara, seperti penurunan tarif bea masuk, merombak tata niaga yang telah dilakukan Singapura dan diikuti Indonesia serta Malaysia, sedangkan Muangthai sekarang juga telah melakukannya sampai tingkat tertentu, namun Filipina masih tersendat-sendat karena situasi politiknya; (b) faktor Jepang yang menganut pola produksi komponen demi komponen. Akibatnya produksi ASEAN terintegrasi dengan sendirinya, karena untuk menghasilkan barang jadi tertentu ada sebagian komponen yang dibuat di Malaysia, sebagian di Muangthai, sebagian lagi di Singapura dan seterusnya; (2) meskipun konsep full manufacturing telah ketinggalan zaman dalam era globalisasi, tetapi justru memberikan momentum untuk membina kerjasama ekonomi ASEAN yang lebih maju dalam arti membuka pasar domestik; (3) langkah-langkah yang diusulkan AEM itu memang perlu dilakukan untuk memperkuat skema-skema yang telah ada; (4) sekarang ini yang diperlukan ASEAN adalah visi, sebab visi yang jelas tentang kerjasama negara-negara Asia Tenggara ini sampai sekarang belum ada; (5) proses liberalisasi deregulasi itu berlaku umum dalam arti tidak hanya ditujukan pada sesama negara anggota ASEAN; (6) perdagangan bebas secara multilateral tetap lebih baik daripada di dalam blok; (7) pada prinsipnya, jika ASEAN mau survive dalam persaingan global, ASEAN harus melepaskan sisa-sisa tataniaga dan program lokalisasi yang tidak realistis; (8) untuk Indonesia yang masih kurang adalah program kebijakan perdagangan (*trade policy*) yang jelas dan

transparan. Indonesia telah melakukan berbagai deregulasi dan reformasi perdagangan, tetapi tidak ada *trade policy* yang transparan dalam arti diketahui orang; (9) pola interdependensi perdagangan dunia telah bergeser dari vertikal menjadi horisontal, dan kebanyakan barang yang diperdagangkan adalah komponen serta barang setengah jadi dan bukan lagi barang mentah dan barang jadi; (10) perdagangan sekarang ini menjadi agak kebal terhadap proteksi sebab impor komponen tidak dapat dilarang karena dapat mematikan industri dalam negeri sendiri; (11) policy maupun mekanisme perdagangan yang bebas dan transparan sangat penting dalam persaingan di pasar dunia yang semakin ketat; (12) suatu forum kebijakan perdagangan yang bertugas melakukan evaluasi dan merancang kebijakan perdagangan Indonesia perlu didirikan.

Pada saat yang sama, Prof. Dr. M. Sadli mengatakan bahwa: (1) sejak tahun 1987 Indonesia menempuh serangkaian deregulasi, berbarengan dengan liberalisasi ekonomi yang dilakukan di negara-negara anggota ASEAN lainnya, sehingga boom ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN justru memantapkan momentum itu; (2) munculnya blok-blok perdagangan di Eropa Barat dan Amerika Utara ditambah dengan kerjasama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mendorong ASEAN untuk tampil; (3) Indonesia tidak takut lagi bersaing dengan produk Malaysia dan Muangthai, bahkan produk Indonesia telah laku dijual di Singapura; (4) kalangan resmi di Jakarta tidak lagi apriori dan menolak gagasan dan tujuan jangka panjang kerjasama ekonomi ASEAN, termasuk integrasi pasarnya, misalnya pengembangan segi tiga Singapura-Johor-Batam; (5) kerjasama ekonomi ASEAN relatif sulit, karena nasionalisme ekonomi sejumlah negara anggotanya masih tebal untuk melindungi produksi dalam negerinya dan Sekretariat Jenderal belum kuat serta belum ada yang mampu menjadi juru bicara ASEAN; (6) Menteri ekonomi Indonesia di kalangan ASEAN pernah dijuluki sebagai Mr. NO, tetapi setelah pertemuan AEM ke-22 di Bali itu Indonesia dijuluki sebagai Mr. GO, karena Indonesia mendukung kuat hasrat untuk maju secara *bold* dan *innovative* antara lain dengan mengganti pendekatan proteksi dengan sistem bea masuk yang realistis. Dari sisi kemampuan industri, Indonesia memang pantas dijuluki Mr. GO; (7) perubahan sikap Indonesia menunjukkan industri di Indonesia bukan lagi *infant industries* yang perlu dilindungi begitu ketat; (8) inisiatif Hartarto yang meminta penyesuaian bea masuk semen, kapal dan pulp di empat negara anggota ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei Darussa-

lam yang terbilang rendah) paling tinggi 15% mencerminkan bahwa tingkat efisiensi industri di dalam negeri telah lebih baik; (9) Indonesia yang tingkat upah buruhnya lebih murah kini justru merasa lebih siap bersaing dengan Malaysia dan Muangthai; (10) kesepakatan yang dicapai para Menteri Ekonomi ASEAN di Bali masih menjadi pertanyaan untuk dapat direalisasikan; (11) kesepakatan itu jangan sampai seperti hasil KTT Manila 1987, kendati telah disepakati oleh para kepala negara beserta para menteri tak kunjung terlaksana di lapangan akibat para pejabat eselon di bawah menteri tidak menemukan kesepakatan (*Kompas*, 5-11-1990).

KTT BUSINESS ASEAN

Direktur Pusat Data Business Indonesia (PDBI), Drs. Christianto Wibisono mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) setelah diwujudkan segi tiga Batam-Johor-Singapura, peran Indonesia dalam kerjasama intra ASEAN sangat tergantung dari kebijaksanaan perdagangan Indonesia sendiri; (2) jika perdagangan Indonesia masuk dalam pasar global, maka ekspor yang selama ini separuhnya melalui Singapura dapat langsung ke negara tujuan; (3) posisi Singapura bagi ASEAN sangat penting, karena di samping kemampuan keuangan, negara ini memiliki jalur penerbangan yang terbesar di ASEAN; (4) meskipun perdagangan internasional memasuki pasar global, ASEAN tetap memerlukan Singapura sebagai negara penghubung; (5) Singapura akan berkembang menjadi negara teknologi dan pusat keuangan; (6) KTT Business ASEAN ke-1 yang diselenggarakan di Singapura adalah untuk memantau lalu-lintas moneter yang berkilat dan berkisar pada dana ACU atau *ASEAN Currency Unit* di negara itu dan kesiapan Indonesia untuk mendaur ulang dana ACU dan membahas bentuk konkret kerjasama ASEAN yang telah berlangsung; (7) PDBI akan menyampaikan makalah tentang Profil dan Anatomi Konglomerat ASEAN. Hal ini merupakan tindak lanjut dari seruan Presiden mengenai perlunya peningkatan kerjasama intra ASEAN dalam program yang lebih konkret tanpa menunggu kesepakatan birokratisasi seperti pasar bersama ASEAN, PTA dan berbagai prosedur administratif; (8) meskipun kerjasama ASEAN pada tingkat birokrasi baru dirasakan dalam bentuk rekomendasi dan risalah rumusan sidang, tetapi pada tingkat operasional bisnis telah terjadi transaksi dan interaksi lintas batas intra ASEAN serta antar berbagai kekuatan bisnis swasta secara aktif dan dinamis; (9) 5

perusahaan milik Indonesia telah masuk dalam daftar 1.000 perusahaan top di Singapura, beberapa perusahaan lagi masuk dalam 500 perusahaan top di Muangthai dan top 1.000 di Filipina; (10) mereka bersama dengan perusahaan top ASEAN lainnya telah melakukan *acquisti* dan investasi lintas batas intra ASEAN (*Suara Karya*, 31-10-1990).

KTT Business ASEAN ke-1 berlangsung di Singapura tanggal 16 November 1990, dihadiri oleh 75 orang peserta dari ASEAN, Jepang, Amerika Serikat dan Hongkong untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan manajemen, perdagangan teknologi dan *ASEAN Currency Unit* (ACU).

Direktur PDBI Christianto Wibisono mengatakan pada seminar itu bahwa: (1) runtuhnya sistem komunisme dunia yang mengakhiri era perang dingin selama 45 tahun antara AS dan Uni Soviet telah menimbulkan proses deideologisasi dalam masyarakat dunia; (2) pada dekade 1990-an sekarang ini, kehidupan masyarakat internasional akan diwarnai oleh tumbuhnya kekuatan baru yang berorientasi pada ekonomi; (3) jaringan kekuatan baru yang disebut *Triad Power* adalah AS, Jepang dan Eropa Barat merupakan kekuatan terpadu "super power baru", yang akan mendominasi konflik versi baru antara Utara dan Selatan; (4) *triad power* cenderung membela kepentingan ekonomi masyarakat kaya berkulit putih dari Utara dan mengabaikan masyarakat miskin yang bukan kulit putih dari Selatan; (5) kekuatan Selatan masih terpecah dan tidak dapat bersatu serta miskin, karena dibebani perasaan primordialisme; (6) majalah *Institutional Investor* tahun 1983 mencatat 12 orang terkaya di dunia dan separuhnya berasal dari ASEAN, 5 dari Timur Tengah serta hanya 1 dari negara maju kapitalis. Majalah *Forbes* dan *Fortune*, 1987 masing-masing mencatat daftar yang berbeda mengenai 100 orang terkaya di dunia, tetapi tetap tokoh ASEAN yang terkemuka, Fortune menempatkan Sultan Brunei sebagai orang terkaya di dunia dan empat orang berikutnya juga berasal dari ASEAN. Secara demikian tidak meragukan lagi bahwa warga ASEAN mengungguli semua orang terkaya di Utara; (7) ASEAN sebagai grup bangsa-bangsa mempunyai kapabilitas untuk mengangkat masyarakatnya dan menciptakan persamaan dengan masyarakat dunia lainnya untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik di masa mendatang; (8) ASEAN relatif berlimpah sumber alamnya dan dinamis sumber daya manusianya; (9) gabungan GNP ASEAN memang masih pada peringkat ke-13 dibanding negara-negara di dunia, tetapi NICs (Korea Selatan, Hongkong

dan Taiwan) telah melihat potensi ASEAN dan investasi mereka di ASEAN mencapai 61% dari total investasinya di Asia; (10) total investasi ASEAN tahun 1989 meningkat 23% dari tahun 1988, menjadi US\$4,4 milyar, dan investasi Jepang di kawasan ini meningkat 48% menjadi US\$1,9 milyar pada periode yang sama; (11) sejak Singapura bertekad menjadi pusat keuangan *Off Shore* dunia dan pada tahun 1988 menciptakan ACU seperti ECU di Eropa, maka pada tahun 1990 volume Asia dolar di ACU meningkat 80 kali menjadi US\$2,5 milyar atau 1,5 kali gabungan GNP ASEAN dan 25% dari volume ECU yang telah lama operasinya; (12) masyarakat ASEAN mampu menciptakan dananya sendiri dan menginvestasi kembali wilayahnya; (13) potensi-potensi ASEAN ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat ASEAN sendiri. Beberapa pengusaha ASEAN telah melihatnya dan tidak menunggu keputusan pemerintah negara anggota ASEAN yang memakan waktu lama untuk menciptakan kerangka kerjasama ekonomi; (14) para pengusaha telah melakukan usaha patungan dan merger serta membuka perwakilan atau kantor cabang secara lintas batas di seluruh kawasan. Banyak pembentukan konglomerat-konglomerat di ASEAN yang bersifat lintas perusahaan besar, menengah dan kecil, secara bersama-sama bersaing dengan perusahaan global dari lain negara; (15) landasan kerjasama telah ada dan potensi tidak diragukan lagi bagi ASEAN untuk mengimbangi dominasi *triad power* untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik; (16) ASEAN memerlukan pemimpin-pemimpin yang bertekad mendidik kembali dan mengubah hati masyarakatnya dari beban primordialisme dan nasionalisme etnis ke semangat nasionalisme modern yang rasionalistis; (17) jika asimilasi dan integrasi masyarakat Cina di Indonesia dan tingkat ASEAN dapat diterima sebagai alternatif terbaik, maka ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi riil bagi kemakmuran masyarakat di kawasannya, tanpa harus konfrontasi dengan *triad power* (*Suara Pembaruan*, 19-11-1990).

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dekan Fisipol UI dan moderator seminar mengatakan bahwa: (1) Indonesia agak lambat memulai pembangunannya, lemah dalam kemampuan berorganisasi, sedikit sekali tenaga terdidik dalam bidang ekonomi dan teknologi dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya; (2) pada tahap sekarang, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di Indonesia justru semakin lemah kontrol pemerintah dan semakin tidak jelas arah pembangunan selain hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan. Indone-

sia memerlukan ramuan yang tepat antara keterbukaan dan kontrol.

Prof. Kunio Yoshihara dari Tokyo University Jepang mengatakan bahwa: (1) Indonesia telah lebih dulu mempunyai organisasi bisnis modern dibanding Jepang dan negara ASEAN lainnya; (2) Oei Tiong Ham Co. di Semarang tahun 1920-an telah memanfaatkan manajer profesional untuk mengembangkan bisnisnya; (3) pengusaha ASEAN tidak dapat lebih jauh dari Oei Tiong Ham, dan tertinggal jauh dari pengusaha di negara industri; (4) dunia usaha baru dapat berkembang besar bila menguasai kapitalisme industri atau kemampuan manufacturing yang bersumber pada kemampuan teknologi; (5) para pengusaha ASEAN lebih berorientasi sebagai pedagang atau kasir dengan memutar uang ke kanan dan ke kiri, sedangkan bila ada pabrik modern pengelolanya diserahkan pada tenaga profesional dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan (*Suara Pembaruan*, 19-11-1990).

Sementara itu, Dr. Anwar Nasution mengatakan bahwa: (1) pengusaha Indonesia perlu memanfaatkan dana *ASEAN Currency Unit* yang jumlahnya cukup besar di tengah ketatnya likuiditas saat ini; (2) dana yang dihimpun melalui ACU sangat besar dan dapat dijadikan alternatif sumberdaya; (3) hingga kini masih banyak pengusaha Indonesia yang belum mengetahui fasilitas ini, padahal persyaratan yang ditetapkan tidak terlalu ketat dan bunganya rendah; (4) hingga kini dana ACU baru dimanfaatkan oleh pengusaha besar saja, karena mereka sudah lengkap; (5) bila pengusaha Indonesia ingin memanfaatkan dana ACU yang perlu diutamakan adalah soal informasi dan ketertiban administrasi, seperti laporan keuangan atau akuntannya dapat dipercaya (*Bisnis Indonesia*, 17-11-1990).

Seminar menyimpulkan antara lain: (1) negara-negara anggota ASEAN harus memanfaatkan ketajaman bisnis untuk memperoleh akses teknologi melalui pasar dan pengembangan ekspor; (2) ASEAN sangat berkepentingan untuk memperhatikan masalah politik dan sosial, karena hal ini mempengaruhi kesanggupan ASEAN untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersama (*Bisnis Indonesia*, 17-11-1990).

C. KONPERENSI FEDERASI IKATAN SARJANA EKONOMI ASEAN

Konperensi Federasi Ikatan Sarjana Ekonomi ASEAN ke-15 berlangsung di Singapura tanggal 15-17

November 1990 untuk membahas masalah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di ASEAN serta meninjau perekonomian ASEAN, baik prospek maupun permasalahan yang dihadapi.

Deputi Direktur Institute of Policy Studies Singapura, Dr. Lee Tsao Yuan, mengatakan pada pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN merupakan kawasan yang paling menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura dan Muangthai yang telah dapat mempertahankannya dalam waktu cukup lama, sehingga keempat negara itu tidak ragu lagi bersama-sama menjadi negara industri baru seperti Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan; (2) Filipina mengalami berbagai kemalangan, termasuk akibat krisis Teluk yang memaksa tenaga kerja negara itu harus pulang ke negerinya sehingga mengurangi pendapatan devisa; (3) kesuksesan keempat negara itu bersumber pada faktor yang sama yakni: (a) mengalami boom ekonomi karena memacu ekspor industri; (b) masuknya modal asing yang besar; (c) deregulasi ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing di pasaran internasional; (d) kondisi internasional yang mendukung strategi pembangunannya; (e) negara industri mampu mengimpor banyak produk dan jasa ASEAN, karena mengalami pertumbuhan ekonomi yang panjang, sehingga proteksionisme bukan merupakan persoalan; (f) revaluasi (peningkatan nilai) mata uang dari negara industri baru dan Jepang, mengakibatkan ekspor mereka menjadi mahal dan memaksa mereka untuk memindahkan kegiatan produksinya serta dananya ke ASEAN; (4) tantangan konkret dari lingkungan internasional yang dihadapi ASEAN adalah: (a) krisis Teluk yang telah mempercepat pertumbuhan inflasi; (b) penurunan pertumbuhan ekonomi di banyak negara industri mengancam ekspor ASEAN yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi mereka; (5) saat ini perdagangan regional antar ASEAN menjadi semakin penting; (6) perundingan perdagangan di GATT yang akan mengakhiri Putaran Uruguay, ternyata mengalami keseretan yang berat; (7) negara-negara ASEAN harus dapat meningkatkan daya saingnya agar dapat tetap menembus pasaran dunia, karena proteksionisme semakin kuat; (8) pembaruan politik dan sosial di Eropa Timur akan menimbulkan pesaing baru bagi barang-barang ASEAN di pasaran dunia, meskipun mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mengungguli ASEAN. Negara-negara Eropa Timur akan menjadi pesaing ASEAN, dalam arti sumber dana internasional akan banyak mengalir ke Eropa Timur, sehingga nilai dana dapat semakin mahal bagi pinjaman-pinjaman un-

tuk investasi di ASEAN; (9) persatuan Pasar Eropa 1992 akan mengancam ekspor ASEAN di bidang-bidang yang sensitif bagi Eropa, seperti kendaraan bermotor, tekstil, pakaian jadi dan sepatu; (10) Indonesia mengalami kemakmuran, tetapi berdiri di alas yang rapuh. Indonesia juga akan menghadapi masalah sosial akibat ketimpangan antar-kelompok dan geografis; (11) Singapura akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban dalam lima tahun mendatang, karena harga minyak yang tinggi dan kurangnya tenaga kerja; (12) Muangthai akan mengalami kesulitan dengan infrastruktur yang padat, serta akan macet akibat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan ketimpangan ekonomi secara regional yang sangat terkonsentrasi di Bangkok serta kurang efisien di sektor perpajakan untuk pendapatan negara; (13) Filipina saat ini yang mengalami krisis ekonomi bertubi-tubi, nasibnya sangat ditentukan oleh cepat tidaknya penyelesaian krisis Teluk; (14) hanya Malaysia yang masih mempunyai prospek yang baik; (15) dalam jangka menengah negara-negara anggota ASEAN tetap mempunyai prospek yang baik; (16) orientasi ekspor dan deregulasi sebagai strategi utama ASEAN dan yang selama ini menjadi kunci keberhasilan harus tetap dilanjutkan (*Suara Pembaruan*, 17-11-1990).

Prof. Dr. Boediono, Deputi Ketua Bappenas RI, mengatakan bahwa: (1) pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 20 tahun di Indonesia telah diikuti oleh pengurangan kemiskinan absolut, tetapi belum pada ketimpangan pendapatan; (2) jumlah orang miskin absolut berkurang 24,2 juta orang selama 20 tahun, yakni dari 54,2 juta orang pada tahun 1966 menjadi 30 juta orang tahun 1987, namun masalah ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan tidak kaya tampak agak lambat perbaikannya; (3) ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh perbedaan pendapatan regional; (4) ditinjau secara sektoral pengurangan kemiskinan yang paling banyak terdapat pada sektor pertanian, pertambangan, transportasi dan konstruksi; (5) sektor industri pengolahan mengalami paling sedikit pengurangan kemiskinan karena penyebaran pabrik-pabrik yang kurang merata, dan hal ini yang menjadi sumber ketimpangan ekonomi; (6) peranan Pulau Jawa dalam output dan kesempatan kerja di sektor industri mulai menurun dibanding dengan wilayah lainnya; (7) pengurangan ketimpangan pendapatan hanya terjadi melalui perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri dan perpindahan dari desa ke kota, tetapi urbanisasi menambah ketimpangan pendapatan di daerah perkotaan; (8) orang sulit mendapatkan pening-

katan pendapatan secara riil, kalau tidak pindah pekerjaan, baik secara sektoral maupun geografis; (9) sektor ekonomi yang relatif berpendapatan tinggi, dibanding sektor lain tidak berminat meningkatkan gaji, karena masih banyak tenaga kerja baru yang mudah diambil dengan tingkat gaji yang ada; (10) sektor yang berpendapatan rendah sulit meningkatkan gaji, karena produktivitasnya tidak meningkat, kecuali mata pencaharian di sektor pertanian beras.

Sementara itu, Prof. Dr. Hendra Asmara, Ketua Delegasi ISEI dari Indonesia mengatakan bahwa: (1) banyak pakar ekonomi merasa prihatin, apakah benar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menciptakan pemerataan, bila tidak maka para ekonom merasa harus mencari teori dan gagasan-gagasan kebijaksanaan baru agar masalah itu tidak berlarut-larut; (2) kalau ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan justru yang menonjol maka akan memancing kecemburuan dan keresahan sosial yang pada gilirannya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi; (3) melalui konperensi ini para sarjana ekonomi ASEAN ingin memeriksa kembali secara ilmiah, apa yang sesungguhnya terjadi di negara masing-masing tentang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (*Suara Pembaruan*, 17-11-1990).

D. KERJASAMA INDUSTRI, MINERAL DAN ENERGI

1. Sidang AFCM ke-14

Sidang *ASEAN Federation Cement Manufactures* (AFCM atau Federasi Industri Semen ASEAN) ke-14 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 19-20 Oktober 1990 dihadiri oleh seluruh pengusaha semen dari ASEAN, termasuk 14 orang delegasi Indonesia untuk membahas masalah harga jual dan kebutuhan semen ASEAN.

Seusai sidang, Presiden AFCM Ir. Setiadi Dirgo mengatakan kepada Antara bahwa: (1) pemerintah negara-negara anggota ASEAN perlu menetapkan harga semen yang wajar, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan industri semen dapat hidup dengan meningkatkan kapasitas produksinya; (2) pada tahun 1991 ASEAN secara keseluruhan masih akan kekurangan 6,7 juta ton semen; (3) kapasitas produksi semen ASEAN tahun 1990 adalah 52,4 juta ton sehingga terdapat kekurangan yang cukup besar, khususnya bagi Filipina dan Muangthai; (4) harga jual semen di negara-

negara ASEAN yang umumnya cukup murah akan menyebabkan industri semen terus menderita dan kurang mampu melakukan perluasan produksi; (5) perluasan produksi semen perlu dana, namun dana hanya dapat diadakan jika harga semen layak dari segi semua pihak yakni pemerintah, konsumen dan industri semen sendiri; (6) sekarang jika ada krisis semen seolah-olah pabrik yang disalahkan, padahal hal itu merupakan masalah bersama sehingga untuk mengatasinya perlu kerjasama pula. Produksi semen di Indonesia masih di atas permintaan, untuk tahun 1990 proyeksi kebutuhan adalah 13,4 juta ton, sedangkan produksinya sekitar 17 juta ton dan kelebihan produksi ini untuk diekspor; (7) masalah angkutan semen merupakan masalah tersendiri, bahkan dalam soal angkutan darat juga masih terdapat kekurangan sarana angkutan; (8) krisis semen yang sedang terjadi di Indonesia akan menjadi pengalaman yang berharga, terutama bagi kalangan pemerintah dan kalangan industri semen untuk mencegah agar hal itu tidak terulang lagi di masa mendatang; (9) peristiwa ini hendaknya dapat mendorong semua pihak untuk melakukan langkah-langkah mendasar agar produksi semen makin terjamin dengan harga jual yang layak (*Merdeka*, 22 Oktober 1990).

2. Pertemuan Dewan AFTEX ke-12

Pertemuan Federasi Industri Tekstil ASEAN (AFTEX) ke-12 berlangsung di Jakarta tanggal 16-17 November 1990 dihadiri oleh 40 orang peserta yang merupakan tokoh terkemuka industri tekstil ASEAN untuk membahas persoalan industri di ASEAN.

Ketua AFTEX Indonesia, Ir. H. Aminuddin, mengatakan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1990 bahwa: (1) untuk menghadapi laju pertumbuhan industri tekstil yang meningkat 30%, negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AFTEX agar menggalakkan ekspornya dan memperhatikan kepentingan regionalnya yang relatif kecil; (2) ASEAN memiliki potensi dan kemampuan menjadi salah satu pengeksport tekstil utama di dunia; (3) ASEAN agar melakukan keterpaduan operasional pemasaran dengan sarana *think tank* dan riset bersama AFTEX, serta kegiatan regional yang bersifat komplementer melalui *co-production* dan pengurangan tarif di lingkungan ASEAN; (4) momentum yang paling menentukan dalam perundingan pembatasan perdagangan internasional adalah pada pertemuan babak terakhir Putaran Uruguay di Brussel bulan Desember mendatang. Pertemuan itu akan menentukan pembatas-

an-pembatasan perdagangan TPT (Tekstil dan Produk Tekstil), yang mungkin akan dihapuskan secara bertahap dengan berbagai pilihan modal; (5) pertemuan AFTEX ke-12 sangat penting dan bernilai sejarah, karena peserta diharapkan akan membawakan aspirasi kalangan pengusaha industri tekstil negaranya masing-masing. Di samping itu para peserta juga ingin mendapatkan kesatuan bahasa dan saling pengertian mengenai masalah per tekstilan (*Pelita*, 30-10-1990).

Menteri Muda Perindustrian Tunki Aribowo mengatakan dalam pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) AFTEX agar mengadakan pengkajian ulang atas posisi industri tekstil ASEAN serta menegaskan kembali kepentingan mereka untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam perdagangan dunia; (2) perubahan-perubahan penting yang bakal terjadi dalam dasawarsa 1990 ini (yang mempengaruhi pola perdagangan internasional pada umumnya dan tekstil pada khususnya) di antaranya adalah: (a) upaya Masyarakat Eropa membentuk suatu blok ekonomi yang mencakup kawasan seluas Amerika Serikat di Eropa; (b) upaya Amerika dan Kanada, dan mungkin juga akan melibatkan Meksiko untuk membentuk suatu kawasan ekonomi di Amerika Utara untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan; (c) reformasi ekonomi sosialis di Eropa Timur dan Uni Soviet untuk menghidupkan kembali sektor swasta; (d) beralihnya pusat pertumbuhan ekonomi dunia dari kawasan Atlantik ke Asia-Pasifik; (3) perubahan itu menimbulkan dampak yang mengharuskan sektor industri melakukan restrukturisasi dengan pembentukan strategi dan pengaturan produksi bersama sebagai gejala globalisasi untuk mempertahankan daya saing dan segmen pasar.

Menteri Muda Perdagangan Dr. Soedradjad Djiwandono mengatakan bahwa: (1) integrasi menyeluruh perdagangan tekstil internasional ke dalam Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) sebagaimana usulan ASEAN merupakan langkah yang paling tepat bagi pelaksanaan mandat Deklarasi Punta del Este yang menandai awal ditempuhnya perundingan GATT Putaran Uruguay; (2) ASEAN mengusulkan agar pada tahun 2000, sistem kuota tekstil dalam perdagangan tekstil internasional dapat dihapuskan, karena perdagangan tekstil diharapkan terintegrasi secara menyeluruh ke dalam GATT; (3) ASEAN menilai cara ini merupakan jalan yang paling sesuai untuk melaksanakan mandat Deklarasi Punta del Este dalam permasalahan tekstil; (4) Deklarasi Punta del Este yang diusulkan oleh para Menteri Perdagangan yang tergabung

dalam GATT tahun 1986 itu bertujuan memperkuat peranan GATT serta sebagai langkah penyempurnaan sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip dan ketentuan GATT. Hal ini berarti, berlakunya sistem perdagangan internasional yang bebas terbuka dan tidak diskriminatif serta bersifat timbal balik dan lebih transparan; (5) pada perundingan GATT Putaran Uruguay tentang tekstil dan pakaian jadi, AS mengusulkan penerapan sistem kuota global sebagai pengganti MFA, yang mulai berlaku 1 Januari 1992 dengan penetapan masa transisi selama 10 tahun; (6) negara-negara anggota Masyarakat Eropa menentang usulan ini, karena merasa takut kalau-kalau ekspor mereka akan diberlakukan begitu juga. Demikian juga, negara-negara pengekspor menyatakan keberatannya, karena sistem itu dinilai hanya sebagai perubahan cara MFA dalam bentuk lain. Sebaliknya AS yang merasa terpicil bersikeras untuk terus memperjuangkan usulannya; (7) MEE secara efektif telah menghambat perundingan tekstil dan pakaian jadi dengan menginterpretasikan Deklarasi Punta del Este memperkuat ketentuan dan disiplin GATT yang merupakan dasar dari usaha pengintegrasian sektor tekstil ke dalam GATT (*Merdeka*, 17-11-1990); (8) ASEAN tidak menginginkan pengaturan perdagangan tekstil dan pakaian jadi diintegrasikan ke dalam GATT secara mendadak dan drastis. Sementara itu ASEAN juga menolak ide memperpanjang masa berlakunya Persetujuan Multi Serat (MFA); (9) kegiatan bisnis tekstil dan pakaian jadi sampai sekarang masih diatur oleh MFA yang tidak sejalan dengan ketentuan GATT; (10) ASEAN masih menyetujui pembatasan ekspor berupa ketentuan kuota yang ditetapkan oleh negara pengimpor kepada negara pengekspor tertentu secara selektif. ASEAN menerima pembatasan itu dengan pengertian akan dihilangkan secara bertahap dan kuota akan ditingkatkan secara progresif dalam jangka waktu yang disepakati; (11) usul MEE untuk membentuk sebuah komite yang bertugas meneliti pelaksanaan kewajiban negara sebelum penghapusan secara bertahap dilaksanakan tidak dapat diterima negara pengekspor; (12) seluruh anggota AFTEX agar selalu mendukung sikap yang diambil pemerintah negara anggota ASEAN dalam bidang tekstil ini (*Angkatan Bersenjata*, 17-11-1990).

Sesuai pertemuan, Ketua Umum AFTEX Indonesia, Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 November 1990 bahwa: (1) pasaran MEE bagi ekspor tekstil dan produk-produk tekstil (TPT) Indonesia kini makin terbuka; (2) bila semula MEE hanya mengizinkan setiap negara anggota ASEAN mengeks-

por TPT berdasarkan kuota negaranya, kini suatu negara ASEAN dapat mengekspor berdasarkan kuota yang dimiliki negara ASEAN lainnya; (3) persetujuan MEE ini dibahas dalam Pertemuan AFTEX ke-12 dan diharapkan dalam waktu dekat dapat direalisasikan; (4) untuk dapat memanfaatkan peluang itu, di antara negara anggota ASEAN harus ada kerjasama yang baik; (5) di masa lalu Singapura hanya boleh mengekspor TPT ke MEE lewat negara itu meskipun mereka memesannya dari Indonesia, tapi kini Singapura yang mempunyai kuota cukup besar dapat langsung mengekspor dari Indonesia ke MEE berdasarkan kuota yang dimilikinya; (6) kebijaksanaan ini hanya berlaku untuk pasaran MEE dan tidak untuk AS, dan bila dilakukan Indonesia untuk pasaran AS, maka Indonesia dapat terkena hukuman dari AS; (7) negara anggota ASEAN yang memiliki kuota besar tetapi memiliki tenaga kerja yang makin mahal cenderung mengekspornya dari Indonesia; (8) kebijaksanaan ini menguntungkan Indonesia dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, karena biaya produksi di Indonesia jauh lebih murah; (9) Indonesia harus mempersiapkan diri agar mampu menyediakan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan negara yang akan mengekspor produknya; (10) pasaran MEE masih potensial karena yang dikenakan kuota oleh mereka hanya untuk jenis-jenis tekstil tertentu seperti pakaian jadi, tetapi untuk beberapa jenis produk tekstil di antaranya benang tidak dikenakan kuota (*Kompas*, 17-11-1990).

Pada saat yang sama Presiden Asosiasi Industri Serat Sintetis Muangthai, Sopon Wichitrakorn, mengatakan kepada pers di Jakarta bahwa: (1) AFTEX menerima baik persetujuan bilateral antara negara-negara anggotanya dengan mengekspor tekstil dan produk tekstil (PTP) ke MEE. Kuota yang disetujui agar dimanfaatkan sepenuhnya; (2) untuk meningkatkan ekspor PTP ke MEE, negara-negara ASEAN boleh menggunakan kuota ekspor negara lainnya yang tidak dapat memanfaatkan kuota ekspornya ke MEE dengan label dan dokumen ekspor negara pemakai kuota; (3) melalui kesepakatan ini para anggota AFTEX dapat saling membantu dengan tukar kuota guna memanfaatkan peluang ekspor PTP ke MEE semaksimal mungkin; (4) AFTEX prihatin atas perundingan internasional mengenai tekstil untuk membantu terwujudnya liberalisasi perdagangan tekstil di Jenewa dalam rangka Putaran Uruguay yang hingga kini belum membuahkan hasil yang konkret; (5) AFTEX sepakat untuk meningkatkan kerjasama di kalangan industri tekstil ASEAN dalam bentuk rencana aksi yang akan dirumuskan dalam pertemuan panitia tetap kerjasama industri AFTEX di

Bangkok tahun 1991; (6) peningkatan kerjasama AFTEX sangat penting, terutama untuk menghadapi kenyataan semakin kuatnya kecenderungan regional untuk membentuk blok-blok ekonomi dan perdagangan seperti MEE dan Amerika Utara (*Merdeka*, 19-11-1990).

E. KERJASAMA PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

1. Zona Perdagangan Bebas

Ketua Federasi Industri Jerman, Dr. Tyll Necker, mengatakan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur tanggal 30 Oktober 1990 bahwa: (1) Malaysia, Singapura dan Muangthai sebaiknya membentuk suatu zona perdagangan bebas dan mengelompokkan menjadi satu pasar agar mampu menarik investasi ke negaranya; (2) ketiga negara ini dalam kegiatan bisnis bukannya saling mengisi, tetapi cenderung bersaing, namun hal itu dapat diselesaikan seperti antara Jerman dan Perancis; (3) Eropa menghadapi masalah serupa guna memperkuat ekonominya, tetapi setelah hubungan antara negara-negara anggotanya dapat diperkokoh melalui pasaran bersama, kini Eropa menjadi suatu kekuatan ekonomi yang dinamis (*Antara*, 31-10-1990).

2. Kunjungan Wisatawan Manca Negara

Humas Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mengatakan kepada *Antara* di Jakarta tanggal 5 November 1990 bahwa: (1) negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1990 diperkirakan menerima sebanyak 18,4 juta wisatawan mancanegara atau meningkat 11,3% dibandingkan tahun 1989; (2) devisa yang akan diperoleh negara-negara ASEAN diperkirakan mencapai US\$16,9 milyar; (3) Indonesia selama semester pertama tahun 1990 diperkirakan memperoleh devisa US\$885,91 juta. Hal ini berdasarkan perhitungan setiap wisatawan untuk setiap kunjungan mengeluarkan US\$790; (4) pada semester pertama tahun 1990, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia melalui empat pintu utama sebanyak 1.121.408 orang atau meningkat 36% dibanding periode yang sama tahun 1989; (5) wisatawan yang masuk sebagian besar mengunjungi Jakarta 31% dengan lama tinggal rata-rata 2,5 hari, menyusul Bali dan Sumatera Utara sebesar 38,8% dengan lama tinggal 1,9 sampai empat hari (*Antara*, 6-11-1990).

3. Taman Nasional

Pertemuan Kelompok Kerja ASEAN mengenai Pelestarian Alam berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 6-7 November 1990 untuk membahas berbagai usulan proyek yang akan dilaksanakan tahun 1991. Proyek-proyek itu antara lain: (1) kerjasama pengelolaan taman-taman perbatasan antara dua negara ASEAN dan kawasan-kawasan lainnya yang dilindungi di rantau ASEAN; (2) pelestarian beragam obyek biologi di ASEAN; (3) perlindungan burung air dan tanah di ASEAN; (4) perlindungan jenis yang terancam kepunahan (*Angkatan Bersenjata*, 8-11-1990).

Deputi Menteri Iptek dan Lingkungan Malaysia, Peter Fah Kui Chin, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) Taman Nasional Kerinci-Seblat di Sumatera bagian tengah, telah dinyatakan sebagai salah satu taman kekayaan ASEAN bersama sejumlah taman nasional lainnya di negara-negara ASEAN; (2) taman-taman ini merupakan contoh kekayaan alam yang luar biasa dari ekosistem dalam Asia Tenggara; (3) sehubungan dengan terjadinya pembunuhan tujuh ekor badak di Taman Kerinci-Seblat, akhir-akhir ini taman itu banyak memenuhi media masa internasional, termasuk di Malaysia; (4) taman-taman nasional yang dinyatakan sebagai kekayaan ASEAN lainnya adalah Gunung Leuser dan Lorentz di Indonesia, Gunung Apo dan Iglit-Baco di Filipina, Gunung Kinibalu dan Hulu di Malaysia, Khao Yai dan Tarutao di Muangthai; (5) kawasan-kawasan itu sangat penting untuk melindungi kekayaan biologis ASEAN yang beragam dan merupakan potensi besar untuk pelancongan dan rekreasi; (6) pernyataan sejumlah taman sebagai kekayaan ASEAN yang harus dilestarikan bersama merupakan salah satu hasil dari pertemuan-pertemuan ASEAN mengenai pelestarian alam yang sudah diadakan delapan kali sejak 1978; (7) Jepang telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu pendanaan berbagai proyek pelestarian alam ASEAN; (8) ASEAN perlu membentuk berbagai program antara lain: (a) penyelamatan penyu laut ASEAN dan perlindungan burung yang berpindah mengikuti musim; (b) perencanaan pengelolaan taman-taman dan kekayaan alam ASEAN serta *ASEAN World Life Society*; (c) pembentukan pusat informasi ASEAN mengenai kekayaan alam, bantuan latihan dan teknik, sumber pendanaan, implementasi kesepakatan ASEAN mengenai pelestarian alam dan sumber-sumber kekayaan alam serta rencana ASEAN mengenai perlindungan jenis yang terancam punah; (9) sejumlah hewan yang terancam punah dari Indonesia yang masuk dalam proyek

perlindungan ini adalah badak Sumatera, badak Jawa, gajah, penyu, anoa, orang utan, langur Mentawai, sedangkan taman nasionalnya adalah Kerinci-Seblat, Gunung Leuser dan Ujung Kulon (*Angkatan Bersenjata*, 8-11-1990).

4. Tahun Kunjungan Indonesia 1991

Direktur Operasi PJKA/Pelaksana Harian Kaperjanka Anwar Supriyadi mengatakan kepada pers di Bandung tanggal 13 November 1990 bahwa: (1) kereta api khusus telah disiapkan oleh Perum PJKA untuk mendukung penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum (ATF) dan tahun kunjungan Indonesia 1991; (2) kereta api wisata yang sekarang baru sebuah akan ditambah lagi dengan dua buah kereta, demikian pula kereta-kereta eksekutif akan ditambah jumlahnya; (3) ada perusahaan swasta yang ingin bersama-sama Perum KA mengembangkan usaha ini; (4) untuk kegiatan ATF, perusahaan itu bersedia mencarter kereta api guna keperluan tersebut; (5) saat ini Perum KA sedang mempersiapkan penambahan kereta eksekutif yang banyak diminati, termasuk promosi Visit Indonesia Year 1991 di gerbong-gerbong maupun stasiun-stasiun kereta api yang didukung sponsor dari swasta; (6) pusat informasi dan pelayanan pembelian tiket untuk wisatawan mancanegara kini telah tersedia di stasiun-stasiun besar; (7) pusat informasi bagi wisatawan dilayani oleh pegawai Perum KA dan petugas-petugas dari Diparda; (8) di stasiun Bandung telah disediakan telepon yang dapat berhubungan langsung dengan hotel-hotel tertentu untuk pemesanan kamar; (9) wartel maupun sarana dan fasilitas lainnya telah tersedia di stasiun-stasiun kereta api; (10) sejak tahun 1989 PJKA memberikan kemudahan kepada para wisatawan mancanegara untuk menggunakan kereta api saja dan di mana saja dengan satu karcis terusan yang diberi batas waktu 10-20 hari dan dapat diperoleh di stasiun besar (*Angkatan Bersenjata*, 15-11-1990).

II. KERJASAMA NON-EKONOMI

A. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMASI

1. Kunjungan Wartawan ASEAN ke Muangthai

PM Muangthai, Chatichai Coonhavan, mengatakan kepada 20 orang wartawan ASEAN yang sedang mengadakan lokakarya tentang peliputan industri dan

perdagangan regional ASEAN di Bangkok, tanggal 13 September 1990 bahwa: (1) negaranya tetap mengutamakan kerjasama dengan sesama negara ASEAN kendati saat ini ingin membangun kerjasama yang erat dengan negara-negara Indocina dan Myanmar; (2) negara-negara Indocina dan Myanmar merupakan tangganya, karena itu Muangthai perlu mengembangkan kerjasama dengan negara-negara tersebut; (3) kerjasama dengan negara-negara ASEAN akan menjadi semakin penting di masa depan, apalagi diperkirakan Eropa Barat akan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada Eropa Timur; (4) AS, Jepang dan Australia diharapkan tetap memberi perhatian yang besar pada kawasan Asia-Pasifik agar tidak terjadi kekosongan di kawasan itu akibat perkembangan di Eropa; (5) Muangthai belum akan menjadi negara industri baru dalam waktu dekat ini, karena belum memiliki industri dasar; (6) Muangthai memerlukan pabrik baja, karena sumber daya alamnya telah tersedia; (7) perang panjang di Kamboja telah menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan regional, karena itu pemerintahnya menetapkan kebijakan untuk mengubah medan tempur Indocina menjadi pasar (*Antara*, 14-9-1990).

2. Lokakarya dan Seminar Wartawan ASEAN

Lokakarya dan Seminar Wartawan ASEAN ke-4 dengan tema "Menulis untuk Media Massa ASEAN" berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 17-30 September 1990, untuk membahas masalah lingkungan, politik luar negeri dan ekonomi ASEAN.

Ketua Komite Kebudayaan Penerangan (COCI) Malaysia, Maslan Achmad, mengatakan pada pembukaan seminar itu bahwa: (1) para wartawan ASEAN diharapkan mampu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan di antara negara anggota ASEAN sehingga perbedaan-perbedaan itu tidak membesar; (2) kemampuan mengenal berbagai perbedaan dan persamaan akan memungkinkan media massa ASEAN membantu cita-cita perhimpunan ini; (3) Indonesia melalui media massanya telah banyak membantu ASEAN untuk menjaga kekompakannya dan seharusnya menjadi tugas semua wartawan ASEAN (*Antara*, 7-9-1990).

Pemimpin redaksi *Bernama*, Malaysia, Abdullah Rahman Sulaiman, mengatakan bahwa: (1) program pertukaran berita antar negara ASEAN (ANEX) agar lebih efektif sehingga mampu menyaingi berita-berita mengenai ASEAN dari kantor-kantor berita internasional; (2) ANEX agar lebih meningkatkan kegiatan

nya, paling tidak mampu mempertahankan kemajuan yang dicapai pada tahun-tahun awal dilancarkannya jaringan berita itu; (3) suatu kantor berita yang punya dana dan staf yang kuat dapat mengambil alih peran ANEX, terutama dalam fungsinya sebagai organisasi pers regional di Asia Tenggara; (4) jika *Bernama*, *PNA*, *TNA* dan *Antara* masing-masing dapat berkembang menjadi kantor berita dengan pengaruh regional, maka kemungkinan ide tentang ANEX dapat ditinggalkan.

Salah seorang redaktur eksekutif *Bernama* SN. Rajan mengatakan bahwa: (1) ANEX harus dilanjutkan karena jaringan ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi anggotanya yang memerlukan berita tentang ASEAN oleh ASEAN sendiri; (2) ANEX perlu menyingkutkan pikiran-pikiran yang terlalu ambisius; (3) *Bernama*, *PNA*, *TNA* dan *Antara* masing-masing cukup mengirimkan tiga berita yang berlatar belakang lengkap, disunting dengan baik, serta tepat waktu untuk ANEX; (4) ANEX harus mempertahankan kemauan politik yang sekarang ada, karena banyak surat kabar ibukota-ibukota ASEAN telah memastikan berita-berita ANEX akan mendapat tempat jika ditulis sesuai dengan patokan-patokan umum yang berlaku tentang berita yang baik (*Antara*, 19-9-1990).

Menteri Penerangan Malaysia, Mohammad Rahmat, mengatakan pada wartawan ASEAN dalam jamuan makan di Kuala Lumpur tanggal 24 September 1990 bahwa: (1) organisasi media massa ASEAN dapat berkembang pesat karena persaingan tidak selalu dilihat dari sisi negatifnya saja; (2) Malaysia menganut konsep yang relatif liberal dalam kebebasan untuk mendapatkan informasi; (3) Malaysia tidak membatasi peredaran buku-buku yang boleh jadi dilarang di Indonesia, tetapi negaranya tidak mengizinkan penggunaan antena parabola yang memungkinkan semua lapisan masyarakat mendapatkan segala macam informasi dari Barat; (4) buku-buku hanya akan mempengaruhi sejumlah kecil orang karena membaca buku membutuhkan kemampuan intelektual, sedangkan mencerna siaran televisi praktis dan dapat dilakukan oleh siapa saja; (5) ASEAN tidak akan mengalami kemunduran dalam kekompakannya, selama masih ada unsur pengikat seperti bahaya komunisme dan upaya menyingkirkan kemiskinan (*Pelita*, 25-9-1990).

3. Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI

Sidang Kelompok Kerja ASEAN-COCI ke-6 berlangsung di Semarang tanggal 13-15 November 1990,

diikuti oleh delegasi Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Brunei Darussalam (masing-masing 3 orang) dan Indonesia (8 orang), untuk membahas pengembangan program-program baru (*Merdeka*, 14-11-1990).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan sidang itu bahwa: (1) kemajuan teknologi informasi berakselerasi sangat cepat, karenanya baik langsung maupun tidak langsung teknologi baru di bidang informasi dan komunikasi itu sedang menancapkan pengaruhnya pada pembangunan dan transformasi kehidupan di ASEAN; (2) perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat dewasa ini sangat baik untuk dipertimbangkan penggunaannya untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang media cetak; (3) ASEAN harus berusaha secara konstan memperkuat rasa solidaritas di segala bidang termasuk kebudayaan dan informasi; (4) kerjasama antar anggota ASEAN dalam berbagai hal harus membuat ASEAN menjadi sebuah kelompok regional yang efektif untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya seperti halnya di bidang ekonomi dan kestabilan politik; (5) keberhasilan ASEAN terutama dirasakan dalam hubungan bertetangga baik dan saling pengertian yang memberikan rasa memiliki identitas regional; (6) berdiskusi tentang masalah-masalah regional dan internasional merupakan motivasi untuk memelihara kepentingan sebagai kelompok; (7) sidang agar memperbaiki rumusan tentang efisiensi dalam kerjasama di bidang media interpersonal dan media cetak; (8) peningkatan media interpersonal tentu tidak akan mengurangi peranan media cetak dan elektronika, bahkan sebaliknya media interpersonal akan meningkatkan keterpaduan informasi dan komunikasi; (9) tujuan pembangunan penerangan dan media massa di Indonesia adalah: (a) sebagai sarana untuk menciptakan penerangan dan komunikasi timbal-balik antar masyarakat, antar masyarakat dan pemerintah, guna menimbulkan semangat kebangsaan untuk berjuang mempertahankan kesatuan dan persatuan; (b) untuk menstimulasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya; (c) untuk memperdalam rasa tanggung jawab dan disiplin nasional; (d) untuk memperkaya nilai-nilai budaya nasional dan memperkuat identitas nasional; (10) media massa dan mereka yang berkepentingan dengan penyebaran informasi harus memperkuat dedikasi dan rasa tanggung jawab profesionalnya, mengembangkan kemampuan dan kualitas tenaga kerjanya serta menggunakan sarana dan prasarana secara lebih efektif dan efisien; (11) pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pembangunan fasilitas komunikasi beserta

prasarananya, terutama dalam pembangunan prasarana komunikasi yang efektif dan nasional, yaitu melalui SKSD Palapa (untuk meningkatkan dan memperkuat komunikasi secara luas agar mencapai daerah atau desa terpencil di kepulauan ini); (12) pemerintah Indonesia telah memberikan penekanan khusus kepada orientasi penerangan pedesaan untuk meningkatkan pembangunan pedesaan, karena sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan; (13) 12 macam usulan-proyek baru tentang media cetak dan interpersonal cukup baik dan bermanfaat bagi pengembangan kerjasama ASEAN pada kedua media itu; (14) kerjasama proyek-proyek itu hendaknya dapat diprioritaskan pada berbagai pokok yang telah disepakati dan diputuskan dalam Konperensi para Menteri Penerangan ASEAN ke-1 tahun 1989; (15) negara anggota ASEAN yang berpartisipasi dalam ANEX agar memperkuat kemampuan ANEX dalam pengumpulan dan penyebaran berita, baik di dalam maupun di luar ASEAN; (16) ASEAN-COCI agar memberikan bantuan dana, supaya ANEX dapat mengembangkan program-program baru seperti penganjutan data bank dan pertukaran informasi serta kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan ANEX (*Merdeka*, 14-11-1990).

4. Festival Lagu-lagu ASEAN

Festival dan Lokakarya Lagu-lagu ASEAN ke-5 berlangsung di Surabaya tanggal 4-13 Oktober 1990, untuk: (1) memperkenalkan perkembangan kebudayaan ASEAN lewat lagu-lagu dan tarian dengan meningkatkan interaksi sosial di antara artis dan komposer ASEAN; (2) meningkatkan apresiasi kebudayaan bersama dari masing-masing negara ASEAN (*Merdeka*, 4-10-1990).

Ketua Lokakarya Paul Hutabarat mengatakan kepada pers di Surabaya tanggal 12 Oktober 1990 bahwa lokakarya gagal melahirkan Hymne ASEAN sebab: (1) ada tiga negara yang sampai saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan *verse* dan *refrainnya*; (2) *scale* yang ditentukan sangat sulit bagi beberapa negara untuk membuat *verse* sesuai dengan ciri khas musik negaranya. Tetapi mereka sepakat agar Festival dan Lokakarya Lagu-lagu ASEAN ke-6 diadakan di Muangthai dan sebelumnya setiap negara anggota diwajibkan mengirimkan dua buah lagu Hymne ASEAN. Lagu itu diserahkan kepada ASEAN COCI Muangthai dalam bentuk *music score* yang lengkap dan direkam dalam pita kaset dengan batas waktu akhir Januari 1991.

Sedangkan liriknya dapat menggunakan bahasa negara masing-masing anggota ASEAN dan mencerminkan identitas ASEAN; (3) ASEAN-COCI Muangthai akan mengedarkan 12 lagu itu kepada negara anggota lainnya untuk mendapat tanggapan; (4) hymne akan didiskusikan dan dipilih yang terbaik oleh komite anggota yang terdiri dari seorang komposer dan seorang musikus dari masing-masing negara anggota ASEAN, sebelum pelaksanaan festival ke-6 (5) COCI dapat membahas pemberian proteksi *copyright* di kalangan komposer ASEAN, karena hal ini sangat penting; (6) seluruh insan musik ASEAN dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkecil dominasi pengaruh musik-musik Barat terhadap musik tradisional (*Merdeka*, 13-10-1990).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan pada pembukaan festival itu bahwa: (1) ASEAN mempunyai sumber kebudayaan yang sangat kaya dan tinggi mutunya; (2) ASEAN dapat secara bersama-sama menggali nilai-nilai kebudayaan itu dan menampilkan dalam bentuk lagu, baik tradisional maupun lagu populer yang telah berkembang di kawasan ASEAN; (3) dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh-pengaruh informasi dan budaya luar, baik yang jelek maupun yang baik, tidak dapat dipilih-pilih untuk menerimanya, dan yang dapat dilakukan ASEAN hanya memperkuat ketahanan sendiri untuk menangkal pengaruh itu; (4) para delegasi telah melakukan lokakarya dan memberikan informasi musik dan perkembangannya serta manfaatnya bagi negara masing-masing; (5) perlindungan hak cipta sangat perlu dan harus dibahas serta ditindak lanjuti, karena selain untuk mencegah pembajakan juga sangat bermanfaat bagi para musisi dan pencipta lagu; (6) festival selain untuk saling berkomunikasi dan mempererat persahabatan juga untuk meningkatkan pergaulan di antara seniman ASEAN; (7) musik dapat mendorong peningkatan persatuan dan kesatuan di samping meningkatkan seni budaya bangsa. Oleh sebab itu para seniman musik hendaknya dapat menciptakan lagu-lagu yang sesuai bagi bangsa ASEAN (*Angkatan Bersenjata*, 15-10-1990).

5. Hadiah ASEAN bagi Wartawan, Pelukis dan Pengarang

Di Singapura tanggal 8 November 1990, Menteri Luar Negeri Singapura, Wong Kan Seng, selaku wakil ASEAN, memberikan penghargaan berupa hadiah senilai US\$1.500 untuk karya terbaik dari wartawan, artis dan pengarang: (1) untuk komunikasi diberikan kepada

wartawan Haji Abdul Wahab Mohammad dari Brunei, Samuel Pardede dari Indonesia, A. Samad Ismail dari Malaysia, Jose L. Pavia dari Filipina, Tan Lian Choo dari Singapura dan Somkiat Onwimon dari Muangthai; (2) untuk seni rupa diberikan kepada Pehin Haji Abdul Rahman Bin Haji Taha dari Brunei, Gregorius Sidharta Soegijo dari Indonesia, Hijjas Kasturi dari Malaysia, Jose Joya dari Filipina, Ng Eng Teng dari Singapura dan Tawes Nandakuang dari Muangthai; (3) untuk kesusasteraan diberikan kepada Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri dari Brunei, Hans Bague Jassin dari Indonesia, Shahnnon Ahmad dari Malaysia, Amelia Lapena Bonafacio dari Filipina, Masuri Bin Sali Un dari Singapura dan M.L. Pin Malakul dari Muangthai; (4) untuk penyutradaraan film diberikan kepada Awang Haji Masri Bin Raub dari Brunei, Teguh Karya dari Indonesia, Abdul Fatah Karim dari Malaysia, Lucio B. San Pedro dari Filipina, Choo Hoey dari Singapura dan Somchai Asanichinda dari Muangthai. Hadiah ini diberikan tiga tahun sekali dan setiap negara akan memperoleh seorang wakil untuk setiap kategori (*Angkatan Bersenjata*, 12-11-1990).

B. LOKAKARYA STRATEGI PENYUSUNAN HUKUM

Lokakarya Strategi Penyusunan Hukum dan Pembangunan Ekonomi ASEAN berlangsung di Bali tanggal 29 Oktober - 10 November 1990, diikuti oleh 41 sarjana Hukum dan Ekonomi dari berbagai perguruan tinggi ASEAN, PNG dan Kanada, untuk membahas analisis ekonomi terhadap suatu peraturan atau penerapan hukum seperti hak milik intelektual, investasi, hukum perburuhan dan transportasi serta perlindungan lingkungan (*Antara*, 7-11-1990).

Menteri Muda Perdagangan RI, Dr. Soedradjad Djiwandono, mengatakan pada lokakarya itu, tanggal 8 November 1990 bahwa: (1) peta perdagangan dunia dewasa ini sedang mengalami perubahan sehingga perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional berubah menuju ke arah globalisasi di bidang investasi, informasi, modal, keuangan dan pasar-pasar komoditi; (2) pada saat yang sama beberapa negara melakukan integrasi ekonomi dalam bentuk kerjasama ekonomi regional seperti yang dilakukan di Eropa Barat dengan rencana pembentukan Pasar Tunggal dan Amerika Utara dengan perjanjian bilateral perdagangan bebas AS-Kanada; (3) kawasan Asia Timur, termasuk ASEAN, masih melakukan kerjasama dan integrasi

ekonomi; (4) saat integrasi ekonomi internasional terjadi di mana-mana dan menjadi perhatian, ternyata ada masalah-masalah lain yang dihadapi, seperti bidang hukum, termasuk hukum internasional; (5) ketika negara-negara berkembang mulai memasuki pasar-pasar ekspor, pesaing-pesaing di luar negeri memperhatikan atau mengharapkan kehadiran hukum dagang untuk proteksi; (6) keterlibatan dalam kontrak-kontrak perdagangan dan investasi yang tidak mengenakan batas suatu bangsa pada gilirannya menuntut perlu adanya hukum baru yang berkaitan dengan hak milik serta pelaksanaan perjanjian; (7) kerjasama ekonomi intra ASEAN sejak 1967 telah memberikan manfaat bagi negara anggota dan mitranya di luar ASEAN, namun perkembangannya masih memerlukan waktu (*Suara Karya*, 10-11-1990).

C. KERJASAMA KEAMANAN

1. Konperensi Keamanan Regional

Menteri Luar Negeri Filipina, Raul Manglapus, mengatakan kepada pers di Manila tanggal 12 September 1990 bahwa: (1) ASEAN telah merencanakan suatu konperensi mengenai keamanan regional, yang akan membicarakan dasar-dasar yang bersifat non-ASEAN, karena sebelumnya telah disepakati untuk tidak membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan dalam kerangka ASEAN; (2) beberapa lembaga yang telah mengadakan studi teknis mengenai masalah keamanan regional dan telah menyodorkan hasilnya, kemungkinan dapat dipakai dalam konperensi; (3) pertemuan antar Menlu ASEAN mengenai masalah keamanan regional baru tampaknya akan berhasil bila lebih dahulu diadakan pertemuan yang sifatnya bilateral; (4) perundingan masalah keamanan regional itu tidak perlu tergantung pada masalah pangkalan AS di Filipina yang sewanya akan berakhir bulan September 1991 (*Kompas*, 13 September 1990).

2. Badan Keamanan Pasifik

Menlu Singapura, Wong Kan Seng, mengatakan kepada pers di Jasper Alberta, Kanada, tanggal 6 Oktober 1990 bahwa: (1) para Menlu ASEAN skeptis atas usul pembentukan organisasi gaya Eropa untuk meningkatkan keamanan dan perdagangan di Pasifik; (2) situasi di Eropa telah memudahkan konsep Kerja-

sama dan Konperensi Keamanan di Eropa (CSCE), namun kondisi yang sama belum didapat di Asia; (3) sebelum masalah keamanan didiskusikan, masalah kebudayaan, etnis dan politik negara di Asia yang berbeda harus diharmoniskan persepsinya agar ada persamaan hukum (*Bisnis Indonesia*, 8-10-1990).

Menlu RI, Ali Alatas, mengatakan kepada Kompas di New York tanggal 6 Oktober 1990 bahwa: (1) untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru di Eropa, Indonesia akan tetap berpegang pada deklarasi ASEAN (ZOPFAN); (2) Indonesia dan Jepang tidak berniat membentuk semacam pengaturan keamanan untuk kawasan Asia-Pasifik seperti yang ada di Eropa; (3) pertemuan 15 Menlu negara-negara Asia-Pasifik yang dipimpin oleh Jepang dan Indonesia di Hotel Waldorf Astoria tidak akan menuju kepada pembentukan suatu organisasi baru tentang keamanan dan kerjasama untuk mengimbangi CSCE di Eropa; (4) ASEAN harus berhati-hati dan jangan menganggap permasalahan dan pendekatan yang berlaku di Eropa dapat diterapkan begitu saja di Asia-Pasifik; (5) pertemuan itu hanya untuk bertukar pikiran mengenai perkembangan yang terjadi di berbagai bagian dunia serta membahas kemungkinan dampaknya bagi negara-negara Asia-Pasifik; (6) ZOPFAN telah cukup merupakan cetak biru yang tidak hanya menyangkut Asia Tenggara, tetapi juga menyangkut tata hubungan negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara besar di sekelilingnya; (7) Indonesia setuju untuk berbicara tentang era baru menjelang masalah Kamboja selesai, tetapi akan berpegang pada ZOPFAN dan akan lebih terbuka mengemukakan ide-idenya berdasarkan ZOPFAN; (8) ASEAN selama ini belum berhasil menerapkan konsep ZOPFAN maupun melaksanakannya, karena munculnya masalah Kamboja; (9) ZOPFAN masih relevan dan ASEAN perlu berpegang pada konsep ini; (10) setelah masalah Kamboja selesai, ASEAN dapat memusatkan perhatian pada masalah-masalah masa pasca Kamboja agar negara-negara Asia Tenggara dapat maju bersama; (11) akan ada satu Asia Tenggara dan bukan Asia Tenggara yang terbagi yang terpolarisasi antara Indocina dan ASEAN; (12) di Asia Tenggara akan terjadi kerjasama yang lebih serasi dan penuh pengertian untuk menghadapi berbagai permasalahan; (13) masalah Kamboja selama ini telah menyelingi dan menghambat pelaksanaan rencana ASEAN; (14) pemikiran bahwa masalah Kamboja sebagai perekat ASEAN sama sekali keliru, sebab prinsip kerjasama ASEAN telah tercipta sebelum masalah itu muncul (*Kompas*, 9-10-1990).

III. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA DIA-LOG

A. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Pertemuan ASEAN-ME (Menteri Kehutanan dan Konservasi Hutan) ASEAN dengan para pejabat ME berlangsung di Brussel tanggal 8-10 Oktober 1990 dan Den Haag tanggal 11-16 Oktober 1990, untuk membahas kebijaksanaan pengelolaan dan konservasi hutan tropis di negara-negara ASEAN.

Komunike bersama pada akhir pertemuan menyatakan: (1) pembahasan difokuskan pada pengelolaan hutan tropis di negara-negara ASEAN; (2) perlu kerjasama program riset hutan tropis antara ME dan negara-negara ASEAN; (3) ME dan ASEAN sepakat untuk bertanggungjawab atas konservasi dan penghijauan kembali hutan tropis; (4) ME mengakui komitmen ASEAN atas pengelolaan hutan yang berkesinambungan; (5) perlu memperkuat mekanisme lembaga-lembaga yang sudah ada untuk kerjasama, seperti ITTO dan TFAP; (6) persetujuan internasional tentang konservasi hutan dunia dan evaluasi dari aspek lingkungan sosial tentang proyek-proyek yang dilaksanakan dalam kawasan hutan tropis adalah penting; (7) sepakat bahwa konservasi hutan dunia merupakan tanggung jawab bersama dan pengembangannya harus berkesinambungan *baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup*; (8) sumber daya manusia seperti ahli-ahli pengelolaan hutan adalah penting.

Dalam seminar sehari tentang Pengelolaan dan Pembangunan Hutan Tropis yang Berkesinambungan di ASEAN yang berlangsung di Den Haag tanggal 11 Oktober 1990, Ketua Delegasi ASEAN, Hasjru Harahap, mengatakan bahwa: (1) ASEAN mengajak pemerintah dan para ahli Belanda untuk bekerjasama dalam pengelolaan dan konservasi hutan tropis di kawasan ASEAN; (2) ASEAN meminta bantuan tenaga ahli dan teknologi dari Belanda; (3) pengelolaan dan konservasi hutan tropis adalah tanggung jawab bersama, baik negara berkembang maupun negara maju; (4) penyelesaian masalah kehutanan dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan dan pembangunan hutan yang berkesinambungan sehingga keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan (*Antara*, 12-10-1990).

Dalam jumpa pers sesuai seminar, Menteri Hasjru Harahap juga mengatakan: (1) tindakan memboikot impor kayu tropis ke negara-negara industri adalah counter-productive; (2) apabila pemboikotan terjadi maka kayu akan dijual ke negara-negara lain atau terpaksa hutan akan dikonversi menjadi lahan non-hutan

guna mengkompensasi pendapatan dari kayu yang tidak bisa dipasarkan; (3) yang dibutuhkan ASEAN adalah perdagangan yang fair, bantuan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia; (4) ASEAN tidak menginginkan dana yang dikompensasikan dengan larangan pemanfaatan hutan tropis; (5) ASEAN harus menjelaskan kepada konsumen Eropa Barat tentang cara pemanfaatan hutan tropis di ASEAN (*Kompas*, 12-10-1990).

B. USAHA ASEAN MEMBANTU PENYELESAIAN KONFLIK KAMBOJA

1. Pertemuan Kelompok Kerja Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC)

Pertemuan pertama dalam rangka membuka kembali Konperensi Internasional Paris tentang Kamboja (PICC) berlangsung di Jakarta tanggal 9-10 November 1990, dihadiri oleh 13 delegasi dari Indonesia, Perancis, AS, Inggris, Uni Soviet, Cina, Kanada, India, Malaysia, Laos, Australia, Jepang serta utusan khusus Sekjen PBB untuk membahas rancangan naskah perdamaian Kamboja berdasarkan dokumen kerangka dasar yang disusun lima anggota tetap DK-PBB.

Menlu Ali Alatas mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) pertemuan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan naskah resmi yang mengikat, tetapi untuk bertukar pikiran dan mencari masukan guna menjabarkan dokumen kerangka dasar penyelesaian masalah Kamboja yang disusun oleh lima anggota tetap DK-PBB; (2) pertemuan diharapkan dapat mencerminkan pemikiran bersama semua pihak yang terlibat dalam PICC; (3) apabila pertemuan gagal maka Ketua Bersama Indonesia-Perancis akan terus menyusun rancangan naskah perdamaian Kamboja, namun sekalipun berhasil naskah tidak dapat dipaksakan untuk diterima oleh pihak-pihak yang bertikai (*Antara*, 9-11-1990); (4) ada dua pendekatan untuk mempertimbangkan bentuk dan struktur naskah perdamaian: (a) membuat satu naskah persetujuan menyeluruh yang ditambah dengan annex-annex; (b) menyusun beberapa kesepakatan yang merupakan bagian dari persetujuan menyeluruh; (5) pertemuan juga membahas tentang hubungan antara SNC dengan UNTAC (*Kompas*, 11-11-1990).

Pertemuan itu menunjukkan antara lain: (1) rancangan naskah perdamaian Kamboja hanya akan berhasil bila mendapat dukungan dan pengertian dari anggota-anggota Dewan Nasional Tertinggi (SNC) Kamboja; (2) tercapai pengertian bersama tentang

struktur dan pendekatan yang harus digunakan untuk menyusun rancangan naskah penyelesaian politik secara menyeluruh; (3) aspek substantif penyelesaian politik secara menyeluruh di Kamboja yang merupakan konsensus anggota tetap DK-PBB dan Ketua Bersama PICC akan dikembangkan dalam pertemuan di Paris; (4) pertemuan selanjutnya tergantung pada pemecahan masalah internal Kamboja (*Antara*, 11-11-1990); (5) pertemuan Kelompok Kerja PICC adalah untuk membantu kedua co-chairman guna menyelenggarakan PICC lagi; (6) peserta PICC mengharapkan agar penentuan Ketua SNC terbentuk (*Kompas*, 11-11-1990).

2. Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB

Pertemuan Lima Anggota Tetap DK-PBB, Inggris, Perancis, AS, Uni Soviet dan Cina ditambah wakil dari

Indonesia berlangsung di Paris tanggal 23-25 November 1990 untuk mendapatkan rancangan perjanjian perdamaian tentang Kamboja.

Dalam pernyataannya dikatakan bahwa: (1) kini terserah pada rakyat Kamboja sendiri untuk menyelesaikan perselisihan yang selama ini menghambat pelaksanaan rencana PBB untuk mencapai perdamaian di Kamboja; (2) mendesak bangsa Kamboja untuk menjamin SNC benar-benar berfungsi sehingga PICC segera dapat dimulai; (3) perlu segera dipilih seorang Ketua SNC, sedangkan wakilnya akan dirundingkan kemudian; (4) dokumen rancangan perjanjian berisi: (a) usul tentang pemberian mandat kepada UNTAC; (b) rincian persyaratan tentang gencatan senjata dan penarikan pasukan; (c) pemilu; (d) pemulangan pengungsi Kamboja; (e) prinsip-prinsip konstitusi baru (*Kompas*, 27-11-1990).



Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **BEREND, Ivan T.,**
Lulusan Universitas Ekonomi dari Fakultas Filsafat di Budapest, Hongaria. Menjadi dosen sejarah ekonomi pada almamaternya pada 1953; Ph.D didapat dalam ilmu ekonomi (1957) dan ilmu sejarah (1958). Dilantik menjadi profesor pada 1964 dan menjadi rektor universitas selama 1973-1979. Diangkat menjadi Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Hongaria sejak 1985 dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Eropa sejak 1986. Secara intensif memberi kuliah pada pelbagai lingkungan universitas di Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Israel, Swedia, Finlandia, Austria, Kanada, dll. Sejak tahun 1955 Berend telah menerbitkan lebih dari 20 buku dan lebih dari 120 studi, baik sendiri maupun bersama pengarang lain.
- **DEWANTO, Wisnu,**
Sarjana Hukum Internasional dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1985; sejak Agustus tahun itu menjadi staf peneliti di CSIS, menangani penelitian dalam bidang Organisasi Internasional, Hukum Laut, Afrika Barat Daya & Selatan serta sebagian Amerika Latin dan Asia Selatan.
- **PRASETYONO, Edy,**
Sarjana Ilmu Politik Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia (1989). Sejak Maret 1990, staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah Indocina.
- **SOESASTRO, Hadi,**
Sarjana di bidang Teknik Pesawat Terbang (Dipl. Ing.), Rhenish Westfaelische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, 1971 dan pada 1978 memperoleh Ph.D dari The Rand Graduate Institute for Policy Studies, Santa Monica, Amerika Serikat; kini anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif CSIS; Anggota Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia (1981 sampai sekarang), Dosen FISIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- **SUKMA, Rizal,**
Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (1989); sejak Juni 1990, staf Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengkaji masalah-masalah RRC dan Asia Timur.